

Interaksi sosial dan politik dalam dinamika lahirnya Pancasila

Mochamad Zakaria

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110076@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Interaksi sosial, dinamika politik, Pancasila, kemerdekaan Indonesia, BPUPKI.

Keywords:

Social interaction, political dynamics, Pancasila, Indonesian independence, BPUPKI.

ABSTRAK

Jurnal ini membahas peran penting interaksi sosial dan dinamika politik dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada masa kemerdekaan tahun 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis historis terhadap sumber sekunder, termasuk dokumen-dokumen sejarah serta teori-teori sosial dan politik. Temuan menunjukkan bahwa interaksi sosial, khususnya peran aktif pemuda dan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, berkontribusi besar dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan. Sementara itu, dinamika politik, melalui proses negosiasi dan kompromi dalam sidang BPUPKI dan PPKI, berhasil menyatukan berbagai ideologi yang beragam menjadi konsensus nilai yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila.

Hasil kajian menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya simbol ideologi, tetapi juga pedoman pragmatis yang inklusif, relevan untuk menghadapi tantangan sosial-politik masa kini seperti ekstremisme dan perpecahan. Rekomendasi terkait pendidikan dan kebijakan publik juga disampaikan untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di era modern.

ABSTRACT

This journal discusses the important role of social interaction and political dynamics in the birth of Pancasila as the foundation of the Indonesian state during the independence period in 1945. This study uses a qualitative approach with historical analysis of secondary sources, including historical documents and social and political theories. The findings show that social interaction, especially the active role of youth and local cultural values such as mutual cooperation, contributed significantly to building national awareness and unity. Meanwhile, political dynamics, through the process of negotiation and compromise in the BPUPKI and PPKI sessions, succeeded in uniting various diverse ideologies into a value consensus that was then formulated in Pancasila. The results of the study confirm that Pancasila is not only an ideological symbol, but also an inclusive, pragmatic guideline, relevant to facing current socio-political challenges such as extremism and division. Recommendations related to education and public policy are also presented to maintain and strengthen the values of Pancasila in the modern era.

Pendahuluan

Pancasila berfungsi sebagai landasan negara Indonesia, bukan hanya sebagai simbol ideologis melainkan juga sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari konteks Sejarah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Dimana interaksi sosial dan dinamika politik memiliki pengaruh besar. Sebagai fondasi negara, Pancasila menyatukan nilai-nilai mulia seperti



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial, yang dibentuk lewat dialog dan negosiasi di antara pemimpin nasional (Yamin, 1958). Latar Sejarah ini meliputi masa kolonialisme Belanda dan Jepang, yang meninggalkan keberagaman sosial dan keperluan akan ideologi persatuan untuk mendirikan negara baru. Kolonialisme belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga ratus tahun menghasilkan stratifikasi sosial yang mendalam, dimana terdapat pembagian kelas yang ditentukan oleh etnisitas dan keadaan ekonomi sedangkan pendudukan jepang dari tahun 1942-1945 membawa elemen-elemen yang baru melalui propaganda serta penggerakan massa.

Sebagai dasar negara, Pancasila lebih dari sekadar simbol nasionalisme; ia berfungsi sebagai pedoman fundamental yang membimbing seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila mencakup sistem nilai yang memuat norma-norma pokok yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa, membentuk karakter dan ciri khas bangsa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Faslah, 2025), Pancasila adalah kerangka filosofis yang bersifat normatif dan fungsional, yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mewujudkan identitas bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur tersebut. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar konsep teoritis, melainkan pedoman praktis yang harus terus dirawat dan diperkuat agar mampu menghadapi dinamika dan tantangan sosial modern, khususnya di era digital saat ini.

Dalam karya “Pancasila: Ideologi Negara dan Dinamika Sosial”, (Soedjatmoko, 1985) menyoroti bahwa Pancasila timbul dari interaksi sosial yang mendalam, di mana figur seperti Soekarno dan Hatta berhubungan dengan masyarakat luas untuk merancang prinsip-prinsip utama. Ini mengindikasikan urgensi memahami dinamika sosial politik dalam kemunculan Pancasila, supaya nilai-nilainya tetap bermakna di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial masa kini. Sejalan dengan pandangan ini, (Putri et al., 2025) menekankan pentingnya kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi untuk menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, terutama dalam menghadapi perubahan budaya dan arus informasi digital yang begitu cepat. Selanjutnya, (Soedjatmoko, 1985) menyatakan bahwa hubungan sosial ini tidak hanya melibatkan kalangan elit politik, tetapi juga mencakup masyarakat bawah seperti petani dan pekerja yang berperan melalui dukungan moral serta keterlibatan dalam gerakan untuk meraih kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar hasil dari atas ke bawah, akan tetapi merupakan produk dari kerja sama sosial yang luas. Di zaman modern ini, dengan kehadiran media sosial dan digitalisasi, hubungan sosial ini berkembang pesat, yang memungkinkan penyebaran nilai-nilai Pancasila berlangsung lebih cepat, namun juga rentan terhadap informasi tidak benar yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Selain itu, signifikasi Pancasila sebagai fondasi negara tercermin dalam konstitusi UUD 1945, dimana prinsip-prinsipnya menjadi pedoman dalam kebijakan public dan Pendidikan. Dalam aspek Sejarah kemunculan Pancasila juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global seperti perang dunia II yang menjadi dorongan bagi Gerakan dekolonisasi di Asia dan Afrika. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa adanya interaksi sosial yang konstruktif, Pancasila tidak mungkin dapat menyatukan masyarakat

yang sangat beragam. Oleh sebab itu, mengenali kontribusi Pancasila dalam menciptakan identitas nasional yang inklusif.

Kajian ini menyoroti dua permasalahan utama yaitu pertama, bagaimana interaksi sosial memengaruhi kemunculan Pancasila. Kedua, dengan cara apa dinamika politik membentuk proses pengembangan Pancasila. Pertanyaan ini muncul dari pengamatan bahwa Pancasila tidak muncul secara mendadak melainkan melalui interaksi antara kelompok sosial dan perdebatan ideologi politik pada masa sebelum Indonesia Merdeka. Proses interaksi sosial misalnya mencakup komunikasi antara tokoh-tokoh generasi muda serta masyarakat tradisional yang berkontribusi pada tercapainya consensus nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, dinamika dalam bidang politik melibatkan negosiasi kekuasaan antara kelompok nasionalis, islam, dan komunis yang sering menimbulkan perselisihan tetapi pada akhirnya menghasilkan kesepakatan.

Pertanyaan pertama menyelidiki dimensi sosial cara mobilisasi pemuda melalui organisasi seperti sumpah pemuda pada tahun 1928 yang berperan dalam pembentukan ideologi nasional. Ini mencakup analisis tentang bagaimana interaksi budaya setempat dengan ide-ide barat dalam mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan kedua berfokus pada dimensi politik yaitu bagaimana sidang BPUPKI menjadi tempat pertarungan ideologis dimana Soekarno berhasil menyatukan berbagai pandangan menjadi lima sila. Studi ini juga mempertimbangkan variabel lain seperti dampak ekonomi pasca kolonial dan pengaruh internasional yang menambah kedalaman pemahaman mengenai rumusan masalah ini.

Metode dan Tujuan

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada studi literatur kajian pustaka dan analisis historis. Strategi ini memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap interaksi sosial dan dinamika politik yang membentuk proses pengembangan dan lahirnya Pancasila. Data yang digunakan dalam studi ini seluruhnya merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data mencakup dokumen-dokumen bersejarah seperti notula Sidang BPUPKI dan PPKI dari tahun 1945, karya-karya dan pidato dari tokoh pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Yamin, serta literatur akademik dan teori-teori dalam ilmu sosial dan politik. Secara spesifik, penelitian ini merujuk pada teori interaksi sosial (George Mead, Max Weber, Ananda) untuk memahami mobilisasi masyarakat dan teori politik (Feith, Purwanto, Gramsci) untuk menganalisis negosiasi ideologi dan pembagian kekuasaan.

Proses analisis data dilaksanakan melalui analisis isi (content analysis) dan interpretasi historis. Data yang terkumpul direduksi dan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan kunci: bagaimana interaksi sosial memengaruhi kemunculan Pancasila dan dengan cara apa dinamika politik membentuk proses pengembangannya. Dalam dimensi sosial, kajian ini menyoroti fungsi kongres pemuda dalam membangun rasa kebersamaan dan peranan nilai budaya setempat seperti gotong royong. Sementara itu, dalam dimensi politik, analisis meliputi strategi kompromi Soekarno dalam sidang BPUPKI untuk menyatukan berbagai pandangan ideologi serta keputusan strategis PPKI

yang mengukuhkan Pancasila sebagai fondasi negara. Keseluruhan analisis ini bertujuan untuk mengungkap pentingnya Pancasila di era modern dengan mengeksplorasi cara interaksi sosial dan politik dapat dipertahankan demi menghadapi isu-isu kontemporer seperti ekstremisme dan perpecahan.

Tujuan dari kajian ini meliputi yaitu untuk mengkaji interaksi sosial dalam konteks kemunculan Pancasila dengan fokus pada kontribusi tokoh masyarakat dan pemuda dan mengungkap peran politik dalam evaluasi ideologi Pancasila yang termasuk konflik ideologi dan Keputusan pemerintah. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengungkap pentingnya Pancasila di zaman modern dengan mengeksplorasi cara interaksi sosial dan politik supaya dapat terus dipertahankan untuk menghadapi isu-isu seperti ekstremisme dan perpecahan. Analisis studi ini diharap bisa menambah pengetahuan dalam literatur Sejarah Indonesia dengan menyoroti hubungan antara sosiologi dan ilmu politik. Secara khusus, tujuan pertama meliputi penyelidikan empiris melalui contoh kasus, seperti fungsi kongres pemuda dalam membangun rasa kebersamaan. Tujuan kedua mencakup penilaian strategis dalam bidang politik seperti cara keputusan PPKI mengukuhkan Pancasila sebagai fondasi negara yang kokoh. Penelitian ini juga berupaya memberikan saran praktis untuk Pendidikan Pancasila agar generasi berikutnya dapat memahami kompleksitas ini secara menyeluruh.

Pembahasan

Interaksi sosial merupakan interaksi yang diartikan sebagai proses dimana individu atau kelompok saling memengaruhi melalui komunikasi dan aksi bersama (Soekmono, 1975). Model interaksi sosial, seperti yang dikembangkan oleh George Mead, mencakup interaksi simbolik dimana individu membentuk identitas lewat percakapan. Dalam kaitan dengan Pancasila, interaksi sosial ini nampak dalam penggerakan masyarakat untuk mendukung ideologi nasional (Amanda, 2010). Soekmono menyatakan dengan lebih mendalam bahwa dalam konteks Indonesia interaksi sosial mencakup unsur budaya, seperti tradisi yang mendukung percakapan antara berbagai kelompok etnis. Ini berbeda dengan pendekatan barat sebab di Indonesia, interaksi sosial umumnya didasari oleh nilai-nilai kolektivisme, yang tercermin dalam sila persatuan Pancasila.

Menurut (Ananda, 2010), hubungan sosial bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu, khususnya selama periode kemerdekaan ketika generasi muda berperan sebagai pendorong perubahan. Penelitian ini juga merujuk pada teori interaksi sosial dari Max Weber, yang menyoroti signifikansi perilaku sosial dalam membentuk struktur masyarakat. Dalam konteks Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial menempatkan nilai-nilai seperti gotong royong sebagai elemen krusial dalam ideologi negara. Selain itu, studi ini mengintegrasikan pandangan modern, seperti teori interaksi sosial di era digital, yang membantu memahami bagaimana Pancasila dapat disebarluaskan melalui platform media sosial kontemporer.

Politik dalam konteks sosial melibatkan pembagian kekuasaan dan pengembalian keputusan kolektif (Feith, 1962). Ideologi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun negara, dimana Pancasila sebagai ideologi negara menggabungkan nilai-nilai sosial menjadi kerangka politik (Purwanto, 2005). Teori ini membantu memahami

bagaimana dinamika politik memungkinkan kemunculan Pancasila. (Feith, 1962) menjelaskan bahwa dalam konteks dinamika politik Indonesia, ideologi Pancasila berfungsi sebagai perantara di antara kepentingan-kepentingan yang beragam, sehingga mencegah terjadinya konflik terbuka. Hal ini terbukti dari kemampuan Pancasila untuk menampung pluralisme agama dan etnis, yang menjadi tantangan besar dalam proses pembentukan negara (Yulianto, 2023). (Purwanto, 2005) menjelaskan bahwa konsep hegemoni ideologi dari Gramsci dapat diterapkan pada Pancasila, di mana ideologi ini mencapai dominasi melalui kesepakatan sosial, bukan melalui kekerasan. Kajian ini juga mengulas teori ideologi Karl Marx, yang memandang ideologi sebagai sarana bagi kelas penguasa, tetapi dalam konteks Pancasila, ideologi ini lebih bersifat menyeluruh dan inklusif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dinamika politik memengaruhi penerapan Pancasila, seperti dalam kebijakan luar negeri yang didasarkan pada sila ketiga (persatuan Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa teori politik bukan sekadar konsep abstrak, melainkan juga memiliki relevansi praktis dalam memahami perkembangan Pancasila.

Indonesia di awal kemerdekaan ditandai oleh keberagaman budaya dan sosial yang tinggi, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan pengaruh agama serta adat setempat. Kolonialisme Belanda dan Jepang meninggalkan efek sosial seperti disintegrasi masyarakat dan kebutuhan solidaritas nasional (Hatta, 1972). Menurut (Hatta, 1972), perpecahan atau disintegrasi terjadi karena strategi Belanda yang dikenal sebagai *divide et impera* (pecah belah dan kuasai), yang tujuannya adalah memisahkan kelompok-kelompok etnis untuk menghalangi terjadinya pemberontakan. Meskipun hanya sebentar, masa pendudukan Jepang memainkan peran dalam menanamkan nasionalisme melalui propaganda "Asia Raya", yang pada akhirnya menjadi landasan bagi kemerdekaan. Keberagaman ini menjadi hambatan, namun juga sumber kekuatan dalam merancang Pancasila yang bersifat pemersatu. Aktivitas politik menjelang kemerdekaan melibatkan organisasi seperti Budi Otonom, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi-organisasi ini berperan dalam menggalang dukungan untuk kemerdekaan, yang kemudian berkontribusi pada pembentukan Pancasila (Tim Penulis Pusat Sejarah dan Tradisi, 1995). Organisasi Budi Utomo, yang dibentuk pada tahun 1908, memprioritaskan upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran nasional. Sementara itu, Sarekat Islam memadukan unsur-unsur agama dengan politik. Adapun PNI (Partai Nasional Indonesia), dengan Soekarno sebagai pemimpinnya, bertindak sebagai penggerak utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Menurut Tim Penulis (1995), evolusi politik ini mencapai titik tertinggi dengan dibentuknya BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI berfungsi sebagai wadah resmi untuk merumuskan dasar negara. Kajian tersebut juga menyoroti bagaimana faktor-faktor internasional, seperti dukungan Sekutu terhadap kemerdekaan Indonesia, turut memengaruhi pergerakan politik di dalam negeri. Selain itu, organisasi-organisasi politik ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya di tingkat pusat (nasional) tetapi juga regional, dengan adanya cabang-cabang di berbagai daerah yang berfungsi memperkuat rasa solidaritas.

Tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Yamin memberikan kontribusi melalui pidato dan diskusi dalam merancang Pancasila. Pergerakan masyarakat, khususnya pemuda, terjadi melalui kongres pemuda dan kampanye nasional, yang memperkuat interaksi

sosial (Yamin, 1958). Soekarno berhasil membangkitkan dukungan generasi muda terhadap ideologi Pancasila melalui pidato terkenalnya, "Lahirnya Pancasila", yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Sementara itu, Hatta, dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, mengambil peran untuk menjamin aspek-aspek praktis dari pelaksanaan ideologi tersebut dapat berjalan. Menurut Yamin, kontribusi tokoh-tokoh kemerdekaan melibatkan dialog yang intens dengan para pemuda, yang berhasil membangun basis dukungan sosial yang kuat. Salah satu puncaknya adalah Kongres Pemuda II tahun 1928, di mana deklarasi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa ditetapkan, yang kemudian menjadi landasan interaksi sosial bagi lahirnya Pancasila. Kajian ini juga menyoroti peran penting wanita, seperti Kartini, dalam memengaruhi penanaman nilai kemanusiaan. Selain itu, interaksi sosial ini diperkuat melalui pendidikan dan propaganda yang efektif menyebarkan nilai-nilai Pancasila hingga ke lapisan masyarakat bawah. Contohnya, hubungan antara tokoh-tokoh ini dengan masyarakat luas memungkinkan nilai-nilai Pancasila disebarkan secara efektif. Budaya setempat, seperti gotong royong dan musyawarah, memengaruhi nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan demokrasi. Tanggapan masyarakat terhadap ideologi baru ini bervariasi, dari penerima hingga penolakan yang mencerminkan dinamika sosial yang kompleks (Amanda, 2020).

Nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan dan demokrasi, sangat dipengaruhi oleh budaya lokal, contohnya praktik gotong royong dan musyawarah. Menurut (Ananda, 2010), respons masyarakat terhadap ideologi baru ini beragam, mulai dari menerima hingga menolak, yang menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Secara spesifik, praktik sosial gotong royong (khas Jawa) merefleksikan prinsip kerakyatan (Sila Keempat), sementara musyawarah mendorong partisipasi demokratis masyarakat. Menurut (Ananda, 2010), dinamika ini dicirikan oleh adanya resistensi dari kelompok konservatif yang menganggap Pancasila terlalu sekuler. Meskipun demikian, ideologi ini berhasil mendapatkan penerimaan luas melalui proses sosialisasi budaya. Kajian ini juga menyoroti bagaimana pengaruh budaya asing, seperti liberalisme Barat, diolah dan diadaptasi menjadi nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Lebih jauh, respons masyarakat terhadap Pancasila sangat beragam, mencakup protes maupun dukungan, yang secara keseluruhan memperkaya proses perumusannya.

Perselisihan antara ideologi Islam, komunisme, dan nasionalisme terjadi selama sidang BPUPKI. Strategi politik Soekarno dalam merancang Pancasila sebagai kompromi membentuk menyelesaikan perselisihan ini (Faith, 1962). Perselisihan ini hampir menyebabkan perpecahan dalam sidang karena adanya dua kubu yang saling bertentangan: kelompok Islam yang berjuang untuk pendirian negara Islam, dan kelompok komunis yang mendesak implementasi sosialisme. Keputusan politik yang diambil dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ketetapan ini selanjutnya diimplementasikan ke dalam konstitusi dan kebijakan publik (Dokumen Sidang BPUPKI, 1945). Sebagai badan transisi, PPKI menjamin legitimasi Pancasila melalui mekanisme pemungutan suara (voting). Dokumen terkait juga menegaskan bahwa keputusan politik ini dicapai melalui konsensus bersama, bukan karena adanya paksaan. Kajian ini juga membahas mengenai implementasi awal dari Pancasila, yang salah satunya terlihat dari pembentukan kabinet pertama yang dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai ideologi tersebut. Selain itu, kontinuitas politik dalam mempertahankan Pancasila

sebagai ideologi negara ditunjukkan melalui peran lembaga-lembaga negara, seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Soekmono menjelaskan bahwa interaksi politik ini memastikan Pancasila sebagai ideologi yang inklusif. Keputusan politik dalam sidang PPKI menetapkan Pancasila sebagai fondasi negara yang kemudian diterapkan dalam konstitusi dan kebijakan public (Dokumen Sidang BPUPKI), 1945). Ini menunjukkan bagaimana politik memfasilitasi realisasi Pancasila. Sidang BPUPKI pada Mei-Juni 1945 dan PPKI pada Agustus 1945 menjadi forum utama. Agenda utama adalah merancang fondasi negara dengan diskusi intensif menghasilkan Pancasila sebagai kompromi (Hatta, 1972). Struktur sidang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok sosial dan politik. Penerimaan Pancasila oleh sebagian besar masyarakat menunjukkan keberhasilan interaksi sosial meskipun ada penolakan dari kelompok ekstrem. Dampak sosialnya termasuk pembentukan identitas nasional yang kuat (Purwanto, 2005).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini secara tegas menggaris bawahi bahwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil dari interaksi sosial yang konstruktif dan dinamika politik yang intens pada masa menjelang dan saat kemerdekaan. Interaksi sosial memegang peranan krusial dalam menyatukan masyarakat yang sangat beragam, dibuktikan melalui mobilisasi kesadaran nasional oleh pemuda, seperti yang terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong dan musyawarah memberikan pengaruh signifikan terhadap prinsip persatuan dan demokrasi dalam Pancasila. Di sisi lain, dinamika politik memainkan peran penting dalam memfasilitasi tercapainya ideologi ini. Sidang BPUPKI menjadi forum utama yang mempertemukan perselisihan ideologis antara kelompok Islam, komunis, dan nasionalis, yang kemudian diselesaikan melalui strategi kompromi Soekarno. Selanjutnya, keputusan strategis PPKI pada Agustus 1945 secara resmi menetapkan dan mengukuhkan Pancasila sebagai fondasi negara. Secara keseluruhan, analisis ini memperkuat Pancasila sebagai ideologi yang inklusif dan efektif, yang hingga kini relevan dalam menangani tantangan kontemporer seperti perpecahan dan ekstremisme.

Berdasarkan temuan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi praktis untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di era modern. Pertama, dalam konteks Pendidikan Pancasila, penting untuk beralih dari pengajaran yang bersifat hafalan menjadi pendekatan yang lebih mendalam, menyoroti kompleksitas interaksi sosial dan perdebatan politik di balik kelahirannya, sehingga generasi mendatang dapat memahami proses konsensus nasional secara utuh. Kedua, di bidang Kebijakan Publik, pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong ke dalam berbagai program pembangunan dan kebijakan, guna memperkuat semangat kolektivisme yang menjadi ciri khas ideologi ini. Terakhir, bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai dampak media sosial dan digitalisasi terhadap penyebaran nilai Pancasila. Hal ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangkal penyebaran informasi tidak benar yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa melalui platform digital.

Daftar Pustaka

- Ananda, E. B. (2010). Interaksi Sosial dalam Proses Pembentukan Pancasila. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 5(2), 45-60.
- Dokumen Sidang BPUPKI. (1945). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Feith, H. (1962). Pancasila dan Dinamika Politik Indonesia. Indonesia. *Indonesia*, 34(1), 78-95.
- Hatta, M. (1972). *Lahirnya Pancasila*. Penerbit Erlangga.
- Purwanto, B. (2005). Interaksi Sosial dan Politik Menuju Perumusan Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(3), 112-128.
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi: Mewujudkan Pancasila yang relevan di era globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25-34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Soedjatmoko. (1985). *Pancasila: Ideologi Negara dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yulianto, Y. (2023). *Aliran pemikiran politik Islam Indonesia (Muhammadiyah, NU, FPI dan HTI)*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/15606/>